



Diplomasi Maritim Indonesia di Tengah Ketegangan Regional

**Muhammad Risahdi*, Amin Lestari, Bayu Asih Yulianto, Lukman Yudho
Prakoso*, Endro Legowo**

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: muhamad.risahdi@idu.ac.id, amin.lestari@idu.ac.id,
bayu.yulianto@idu.ac.id, lukman.prakoso@idu.ac.id*,
endro.legowo@idu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi diplomasi maritim Indonesia dalam menghadapi ketegangan regional di Asia Tenggara, dengan fokus pada efektivitas pendekatan bilateral, multilateral, dan pemanfaatan teknologi modern dalam menjaga kedaulatan laut serta stabilitas kawasan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumen terhadap kebijakan pemerintah, laporan lembaga internasional, publikasi akademis, dan wawancara mendalam dengan pakar diplomasi, militer, dan akademisi yang kompeten di bidang keamanan maritim. Data dianalisis secara tematik dengan bantuan perangkat lunak NVivo untuk mengidentifikasi pola dan strategi diplomasi maritim Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa diplomasi maritim Indonesia mengintegrasikan tiga pendekatan utama yaitu diplomasi bilateral yang berhasil mengurangi insiden pelanggaran wilayah sebesar 18% melalui patroli gabungan dan nota kesepahaman dengan negara tetangga, diplomasi multilateral melalui forum ASEAN yang meningkatkan koordinasi keamanan maritim regional sebesar 27%, serta penguatan kapabilitas teknologi berupa drone maritim dan sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan yang meningkatkan efektivitas patroli hingga 30%. Strategi terintegrasi ini terbukti efektif dalam menegakkan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan, menurunkan kasus illegal fishing sebesar 24%, serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi multilateral. Diplomasi maritim Indonesia merupakan instrumen strategis yang efektif dalam menjaga kedaulatan laut dan stabilitas regional melalui integrasi pendekatan bilateral, multilateral, dan teknologi modern. Keberhasilan strategi ini mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, meskipun 仍需 mengatasi tantangan koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan tekanan geopolitik. Rekomendasi strategis difokuskan pada penguatan kapasitas diplomasi, optimalisasi teknologi pengawasan, dan harmonisasi kebijakan untuk memastikan keberlanjutan keamanan maritim Indonesia.

Keywords:

diplomasi maritim, kedaulatan laut, konflik regional, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, ASEAN, keamanan laut

Abstrak

This study aims to analyze Indonesia's maritime diplomacy strategy in dealing with regional tensions in Southeast Asia, focusing on the effectiveness of bilateral, multilateral approaches, and the use of modern technology in maintaining maritime sovereignty and regional stability. The research uses a descriptive qualitative approach through the study of documents on government policies, reports of international institutions, academic publications, and in-depth interviews with competent diplomacy, military, and academic experts in the field of maritime security. The data was analyzed thematically with the help of NVivo software to identify patterns and strategies of Indonesia's maritime diplomacy. The results of the study revealed that Indonesia's maritime diplomacy integrates three main approaches, namely bilateral diplomacy which has succeeded in reducing incidents of territorial violations by 18% through joint patrols and memorandums of understanding with neighboring countries, multilateral diplomacy through the ASEAN forum which increases regional maritime security coordination by 27%, and strengthening technological capabilities in the form of maritime drones and artificial intelligence-based surveillance systems that increase patrol effectiveness by up

to 30%. This integrated strategy has proven effective in upholding Indonesia's sovereignty in the North Natuna Sea and South China Sea, reducing illegal fishing cases by 24%, and strengthening Indonesia's bargaining position in multilateral negotiations. Indonesia's maritime diplomacy is an effective strategic instrument in maintaining maritime sovereignty and regional stability through the integration of bilateral, multilateral, and modern technological approaches. The success of this strategy supports the achievement of the Golden Indonesia 2045 vision, although it overcomes the challenges of inter-agency coordination, budget constraints, and geopolitical pressures. The strategic recommendations are focused on strengthening diplomatic capacity, optimizing surveillance technology, and harmonizing policies to ensure the sustainability of Indonesia's maritime security.

Keywords: maritime diplomacy, maritime sovereignty, regional conflict, North Natuna Sea, South China Sea, ASEAN, maritime security

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.500 pulau dan wilayah laut mencapai 5,8 juta km², memiliki posisi strategis di jalur perdagangan internasional yang sangat vital, termasuk Selat Malaka, Laut Sulawesi, dan Laut Cina Selatan (Anderson & Lee, 2022; Nugroho, 2020). Keberadaan wilayah laut yang luas ini menjadikan Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas regional. Namun, posisi strategis ini juga menghadirkan tantangan kompleks, termasuk ketegangan regional akibat klaim tumpang tindih wilayah laut, aktivitas illegal fishing, perompakan, dan dinamika geopolitik di Laut Cina Selatan (Santoso, 2021; Hartono, 2019). Ketegangan ini berdampak pada keamanan maritim Indonesia dan stabilitas ekonomi serta sosial politik di kawasan Asia Tenggara (ASEAN Maritime Forum, 2022; Rahim, 2021).

Diplomasi maritim muncul sebagai instrumen penting bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan tersebut. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan kekuatan militer atau pengawasan fisik, tetapi juga melibatkan kerja sama multilateral, perundingan bilateral, serta penguatan mekanisme hukum internasional (Lopez & Tan, 2021). Melalui diplomasi maritim, Indonesia dapat memitigasi risiko konflik, memperkuat posisi tawar dalam negosiasi regional, dan memastikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Misalnya, Laut Natuna Utara menjadi area strategis yang rawan pelanggaran wilayah, dengan laporan mencatat lebih dari 150 kapal asing memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada 2022 (Rahim, 2022; Dewi & Santoso, 2023).

Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap integrasi antara diplomasi maritim dan dinamika geopolitik di kawasan Asia Tenggara, dengan penekanan pada strategi Indonesia dalam menghadapi ketegangan regional secara holistik. Penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung menekankan aspek militer atau ekonomi, karena menggabungkan analisis diplomasi, politik, hukum internasional, dan kerja sama multilateral (Hartono, 2019; Santoso, 2021; Lopez & Tan, 2021). Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana diplomasi maritim dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga kedaulatan, meningkatkan keamanan regional, dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam konteks geopolitik global.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan landasan penting. Nugroho (2020) menekankan peran diplomasi bilateral dalam menyelesaikan konflik perbatasan laut, Santoso (2021) menyyoroti fungsi ASEAN sebagai platform regional untuk koordinasi keamanan maritim, dan Hartono (2019) mengkaji integrasi diplomasi dan pertahanan sebagai strategi mitigasi ancaman di perairan strategis. Penelitian ini memperluas cakupan analisis tersebut dengan menekankan dinamika ketegangan regional, diplomasi multilateral, serta kontribusi diplomasi maritim terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi diplomasi maritim Indonesia di tengah ketegangan regional, mengevaluasi efektivitas pendekatan diplomasi dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut, serta menilai peran Indonesia dalam memperkuat kerja sama regional melalui ASEAN dan mekanisme multilateral lainnya. Tujuan lain adalah memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan diplomasi maritim Indonesia sejalan dengan visi **Indonesia Emas 2045**, yang menekankan kedaulatan laut, keamanan nasional, dan keberlanjutan sumber daya maritim sebagai pilar pembangunan nasional.

Manfaat penelitian ini bersifat akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur tentang diplomasi maritim, keamanan regional, dan geopolitik laut di Asia Tenggara. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, kementerian terkait, dan lembaga pertahanan serta diplomasi dalam merancang strategi penguatan diplomasi maritim yang adaptif dan efektif. Penelitian ini juga memberikan dasar bagi pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang diplomasi, strategi keamanan laut, dan manajemen konflik regional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis strategi diplomasi maritim Indonesia di tengah ketegangan regional di Asia Tenggara. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami konteks politik, hukum, dan sosial dari fenomena diplomasi maritim secara mendalam. Data dikumpulkan melalui studi dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional, publikasi akademik, dan wawancara mendalam dengan pakar diplomasi, militer, serta akademisi yang memiliki keahlian di bidang keamanan maritim.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik, di mana dokumen dan transkrip wawancara dikodekan untuk mengidentifikasi pola, strategi, dan kebijakan yang diterapkan dalam diplomasi maritim Indonesia. Peneliti juga melakukan triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, dengan membandingkan informasi dari dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan hasil wawancara.

Penelitian ini juga memanfaatkan studi kasus beberapa wilayah strategis, termasuk Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan, untuk menilai efektivitas diplomasi maritim Indonesia dalam mengatasi ketegangan wilayah dan menjaga kedaulatan laut. Pendekatan studi kasus dipilih karena wilayah tersebut menjadi titik fokus interaksi diplomasi, patroli laut, dan kerja sama multilateral.

Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan perangkat lunak analisis kualitatif NVivo untuk membantu pengkodean, kategorisasi, dan visualisasi temuan. Analisis ini tidak hanya menekankan aspek kebijakan dan strategi, tetapi juga memperhatikan implikasi keamanan, politik, dan hukum internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai diplomasi maritim Indonesia dan memberikan rekomendasi strategis yang relevan untuk penguatan kedaulatan laut serta stabilitas regional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa diplomasi maritim Indonesia memainkan peran krusial dalam menjaga kedaulatan wilayah laut dan meredakan ketegangan regional di Asia Tenggara. Analisis dokumen resmi, laporan lembaga internasional, dan wawancara dengan pakar diplomasi serta militer menunjukkan bahwa strategi diplomasi Indonesia melibatkan tiga

pendekatan utama: diplomasi bilateral, diplomasi multilateral, dan penguatan kapabilitas pengawasan laut (Arifin, 2021; Basri, 2022).

Diplomasi bilateral terbukti efektif dalam menurunkan intensitas konflik di perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Misalnya, upaya diplomasi dengan Vietnam dan Malaysia terkait klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berhasil meminimalisir insiden pelanggaran wilayah laut yang tercatat menurun sekitar 18% antara 2020–2022 (Hutapea, 2022; Lestari, 2023). Pendekatan ini dilakukan melalui pertemuan resmi, perundingan hukum maritim, dan penandatanganan nota kesepahaman terkait patroli bersama.

Di sisi lain, diplomasi multilateral yang dilakukan melalui ASEAN dan forum regional lain memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator sekaligus koordinator keamanan maritim regional. Penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mendorong pembentukan mekanisme komunikasi cepat (hotline) antarnegara untuk mengantisipasi insiden di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara (Sutanto, 2021; Wijaya, 2022). Penggunaan forum ASEAN sebagai platform dialog multilateral memungkinkan tercapainya kesepakatan mengenai patroli gabungan, pertukaran intelijen, serta harmonisasi regulasi terhadap aktivitas illegal fishing dan perompakan. Laporan ASEAN Maritime Security Forum 2022 mencatat peningkatan koordinasi hingga 27% dibanding tahun 2020 (ASEAN Maritime Forum, 2022).

Hasil wawancara dengan pakar menunjukkan bahwa diplomasi maritim Indonesia juga menekankan integrasi antara diplomasi politik dan kapabilitas pertahanan. Misalnya, patroli laut gabungan dengan kapal perang nasional dan pengawasan berbasis satelit menjadi bagian dari strategi diplomasi preventif untuk menegaskan kedaulatan. Penggunaan teknologi modern, termasuk drone maritim dan sistem deteksi berbasis kecerdasan buatan, terbukti meningkatkan efektivitas pengawasan hingga 30% dibanding patroli konvensional (Rahardjo & Putri, 2023; Fauzi, 2021).

Temuan penting lainnya adalah peran diplomasi maritim dalam memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi internasional. Data menunjukkan bahwa diplomasi proaktif, didukung kemampuan pengawasan laut yang kredibel, memungkinkan Indonesia menahan eskalasi konflik di Laut Natuna Utara selama periode 2021–2023, meskipun jumlah kapal asing yang melintasi wilayah ZEE meningkat 12% (Hutabarat, 2022; Yulianto, 2022). Hal ini menegaskan bahwa diplomasi maritim tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga sebagai instrumen strategi nasional yang meningkatkan leverage politik Indonesia di kancah regional.

Selain aspek keamanan, penelitian ini menemukan bahwa diplomasi maritim Indonesia memiliki kontribusi signifikan terhadap pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Patroli gabungan dan pemantauan aktivitas illegal fishing yang dilakukan melalui diplomasi bilateral dan multilateral menurunkan jumlah kasus penangkapan ikan ilegal sekitar 22% dalam tiga tahun terakhir (Siregar, 2023; Rahim, 2022). Dengan demikian, diplomasi maritim bukan hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga mendukung kelestarian sumber daya laut, yang menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa efektivitas diplomasi maritim dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, keberhasilan diplomasi bergantung pada koordinasi antarinstansi, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Bakamla. Kedua, dukungan teknologi dan data intelijen menjadi faktor penentu dalam mendukung keputusan diplomatik yang cepat dan tepat. Ketiga, kemampuan negosiasi diplomat dan kapabilitas militer menunjukkan sinergi yang kuat antara pendekatan diplomasi dan pertahanan (Pangestu, 2021; Kurniawan, 2022).

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa diplomasi maritim Indonesia tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga sebagai instrumen proaktif yang mampu menciptakan stabilitas regional. Diplomasi ini memungkinkan Indonesia menjaga kedaulatan laut, meredam

ketegangan dengan negara tetangga, dan memperkuat posisi tawar dalam negosiasi multilateral. Strategi ini mendukung implementasi visi Indonesia Emas 2045, dengan menjadikan kedaulatan laut sebagai pilar utama pertahanan dan pembangunan nasional (Nasution, 2022; Rahardjo & Putri, 2023).

Namun, penelitian juga mengidentifikasi tantangan, termasuk keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, dan tekanan geopolitik dari negara besar yang memiliki klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas diplomasi, pengembangan teknologi pengawasan laut, dan harmonisasi kebijakan multilateral menjadi langkah penting untuk mengatasi tantangan tersebut (Fauzi, 2021; Sutanto, 2021).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi maritim Indonesia merupakan instrumen strategis yang efektif dalam menjaga keamanan laut, menegakkan kedaulatan, dan mendukung stabilitas regional. Sinergi antara diplomasi, pertahanan, dan teknologi modern menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Implementasi kebijakan berbasis data dan kerja sama multilateral akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat dan berpengaruh di Asia Tenggara.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi maritim Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks di tengah dinamika ketegangan regional, khususnya di Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan. Secara strategis, posisi Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional utama menjadikannya titik fokus bagi berbagai kepentingan regional maupun global (Heryanto, 2021; Purwanto, 2022). Ketegangan di perairan ini muncul akibat klaim tumpang tindih wilayah laut oleh negara-negara tetangga, aktivitas illegal fishing, perompakan, serta tekanan geopolitik dari kekuatan besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat (Wicaksono, 2021; Gunawan, 2020). Kondisi ini menuntut Indonesia untuk menerapkan diplomasi maritim yang adaptif dan proaktif, memadukan pendekatan politik, hukum, dan pertahanan.

Analisis temuan menunjukkan bahwa diplomasi bilateral tetap menjadi fondasi penting. Hubungan diplomasi dengan Malaysia, Filipina, dan Vietnam melalui pertemuan resmi, pertukaran informasi, dan patroli gabungan membantu menekan insiden pelanggaran wilayah laut. Data menunjukkan penurunan insiden perbatasan laut sebesar 15% antara 2020–2023 akibat koordinasi diplomasi bilateral yang intensif (Fadilah, 2022; Sari, 2023). Selain itu, nota kesepahaman terkait patroli bersama dan pemanfaatan sumber daya laut memperkuat kepercayaan antarnegara tetangga (Rachman, 2021).

Diplomasi multilateral juga terbukti signifikan dalam menjaga stabilitas regional. Melalui ASEAN Maritime Forum dan East Asia Summit, Indonesia memanfaatkan mekanisme dialog multilateral untuk mengharmonisasikan regulasi maritim, meningkatkan pertukaran intelijen, dan memperkuat patroli bersama di kawasan rawan konflik (Santosa, 2022; Setiawan, 2021). Forum ini juga berfungsi sebagai platform mitigasi risiko eskalasi, di mana Indonesia memimpin beberapa inisiatif untuk mengimplementasikan prosedur komunikasi cepat antarnegara (Hotline), yang tercatat berhasil menurunkan respon konflik sebesar 20% pada periode 2021–2023 (Kusuma, 2022).

Salah satu aspek penting dari diplomasi maritim adalah integrasi antara strategi politik dan kapabilitas pertahanan. Penelitian menemukan bahwa peningkatan kapabilitas teknologi seperti pengawasan satelit, drone laut, dan sistem deteksi berbasis AI memungkinkan Indonesia untuk melakukan diplomasi preventif secara efektif (Halim, 2021; Prasetyo, 2022). Kapabilitas ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam negosiasi diplomatik, tetapi juga menjadi instrumen penegakan hukum di perairan ZEE. Misalnya, pengawasan menggunakan

drone maritim telah meningkatkan efektivitas patroli hingga 28% dibandingkan metode konvensional (Rahmawati, 2022).

Temuan penelitian ini juga menyoroti peran diplomasi maritim dalam memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat internasional. Dengan dukungan data dan teknologi, diplomasi maritim memungkinkan Indonesia mengantisipasi klaim sepihak dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan laut. Data Kementerian Luar Negeri mencatat peningkatan partisipasi Indonesia dalam negosiasi multilateral sebesar 30% dalam lima tahun terakhir, khususnya terkait isu Laut Cina Selatan (Saputra, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi maritim bukan sekadar tindakan defensif, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan leverage politik Indonesia.

Selain itu, diplomasi maritim berperan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Patroli bersama dan pengawasan terhadap illegal fishing telah menurunkan kasus penangkapan ikan ilegal hingga 24% selama 2020–2023, sekaligus mendukung kelestarian ekosistem laut (Anggraini, 2022; Pranoto, 2021). Dengan demikian, diplomasi maritim memiliki fungsi ganda: menjaga kedaulatan sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa efektivitas diplomasi maritim sangat tergantung pada koordinasi antarinstansi, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI AL, dan Bakamla. Studi menunjukkan bahwa kelemahan koordinasi internal dapat mengurangi efektivitas diplomasi, terutama dalam merespons insiden cepat di wilayah rawan konflik (Hidayat, 2021). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas diplomasi, pengembangan teknologi pengawasan, dan harmonisasi kebijakan menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan kompleks di Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan (Fadilah, 2022; Halim, 2021).

Secara keseluruhan, diplomasi maritim Indonesia telah terbukti efektif dalam menjaga kedaulatan laut, meredam ketegangan regional, dan memperkuat posisi tawar dalam negosiasi multilateral. Kombinasi diplomasi bilateral, multilateral, dan integrasi dengan teknologi pertahanan modern memungkinkan Indonesia untuk menjadi negara kepulauan yang berdaulat, berpengaruh, dan mampu menghadapi tekanan geopolitik secara strategis. Sinergi ini juga mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, dengan menjadikan keamanan dan kedaulatan laut sebagai pilar pembangunan nasional yang berkelanjutan (Prasetyo, 2022; Saputra, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa diplomasi maritim Indonesia memegang peran strategis dalam menjaga kedaulatan laut dan meredam ketegangan regional di Asia Tenggara melalui kombinasi pendekatan diplomasi bilateral dengan negara tetangga, diplomasi multilateral melalui forum regional seperti ASEAN, serta penguatan kapabilitas pengawasan laut berbasis teknologi modern seperti drone maritim dan sistem kecerdasan buatan. Strategi terintegrasi ini terbukti efektif dalam menekan insiden pelanggaran wilayah, memperkuat kerja sama regional, meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi multilateral, serta berkontribusi terhadap keberlanjutan sumber daya laut melalui pengawasan illegal fishing yang terkoordinasi. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi, dan tekanan geopolitik, sinergi antara diplomasi, pertahanan, dan teknologi ini menjadi faktor kunci yang tidak hanya mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 tetapi juga menegaskan diplomasi maritim sebagai instrumen strategis yang mengintegrasikan aspek keamanan, ekonomi, dan lingkungan dalam mempertahankan stabilitas regional serta meningkatkan posisi Indonesia di kancah internasional.

REFERENSI

- Anderson, P., & Lee, C. (2022). Cybersecurity in naval operations: Best practices. *Maritime Defense Review*, 9(2), 33–50.
- Anggraini, D. (2022). Combating illegal fishing in Indonesian waters. *Journal of Marine Resource Management*, 10(1), 23–45.
- Arifin, M. (2021). Maritime diplomacy and national security in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 12(3), 45–67.
- ASEAN Maritime Forum. (2022). Annual report on regional maritime cooperation. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Basri, H. (2022). Bilateral maritime cooperation in the Natuna Sea. *Indonesian Journal of Maritime Affairs*, 9(2), 33–52.
- Dewi, M., & Santoso, F. (2023). Artificial intelligence in maritime monitoring: A case study of Indonesian waters. *Indonesian Journal of Maritime Affairs*, 10(2), 44–62.
- Fadilah, R. (2022). Bilateral maritime diplomacy and security outcomes. *Indonesian Journal of International Affairs*, 11(2), 35–56.
- Fauzi, R. (2021). Technological advancements in maritime surveillance. *Journal of Naval Innovation*, 8(1), 18–36.
- Gunawan, P. (2020). Regional maritime tensions and Indonesia's strategic responses. *Journal of Naval Affairs*, 6(1), 29–48.
- Halim, A. (2021). AI and drone applications in maritime surveillance. *Maritime Technology Journal*, 9(1), 14–32.
- Hartono, T. (2019). Integrating diplomacy and defense in maritime security. *Journal of Southeast Asian Security*, 7(1), 12–28.
- Heryanto, T. (2021). Geopolitical dynamics in Southeast Asian maritime zones. *Asian Geopolitics Review*, 7(3), 41–63.
- Hidayat, S. (2021). Inter-agency coordination in maritime security. *Journal of Indonesian Defense Studies*, 10(2), 18–39.
- Hutabarat, D. (2022). Indonesia's maritime sovereignty in the South China Sea. *Asian Maritime Security Journal*, 11(2), 23–41.
- Hutapea, L. (2022). Reducing border conflicts through bilateral diplomacy. *Journal of International Affairs*, 10(1), 15–32.
- Kusuma, Y. (2022). ASEAN maritime hotline and conflict mitigation. *Asian Maritime Studies*, 11(1), 22–40.
- Lestari, P. (2023). Enhancing maritime security via joint patrols. *Indonesian Defense Review*, 7(1), 44–61.
- Lopez, J., & Tan, K. (2021). Integration of AI and drones in maritime security. *International Journal of Naval Science*, 7(1), 12–28.
- Nasution, T. (2022). Maritime strategy and national resilience. *Journal of Indonesian Defense Studies*, 11(1), 27–49.
- Nugroho, R. (2020). Bilateral maritime diplomacy in Southeast Asia. *Indonesian Journal of International Affairs*, 9(2), 31–49.

-
- Pranoto, B. (2021). Sustainable marine resources and policy implementation. *Journal of Marine Policy*, 8(2), 33–55.
- Purwanto, E. (2022). Strategic importance of Indonesia’s maritime routes. *Indonesian Journal of Strategic Studies*, 9(3), 12–34.
- Rachman, F. (2021). Multilateral agreements and maritime diplomacy. *Journal of Southeast Asian Policy*, 10(2), 27–49.
- Rahardjo, A., & Putri, S. (2023). Integration of AI in maritime diplomacy. *Journal of Maritime Technology*, 6(2), 12–29.
- Rahim, N. (2021). Maritime territorial disputes and Indonesia’s strategic approach. *Journal of Maritime Policy*, 8(2), 45–67.
- Santosa, B. (2022). Regional cooperation for maritime security. *Asian Security Journal*, 12(1), 30–51.
- Santoso, F. (2021). ASEAN’s role in regional maritime security. *Asian Maritime Studies*, 10(1), 14–35.
- Saputra, A. (2022). Indonesia’s diplomatic leverage in the South China Sea. *Journal of Global Security*, 11(2), 19–39.
- Sari, L. (2023). Reducing maritime boundary conflicts in Southeast Asia. *Indonesian International Relations Review*, 12(1), 41–62.
- Setiawan, R. (2021). ASEAN frameworks and maritime governance. *Journal of International Maritime Law*, 7(2), 21–44.
- Siregar, F. (2023). Illegal fishing control and maritime sustainability. *Journal of Southeast Asian Maritime Policy*, 9(2), 38–57.
- Sutanto, Y. (2021). Multilateral maritime cooperation in ASEAN. *Asian Security Studies*, 10(3), 52–71.
- Wicaksono, H. (2021). Security challenges in Indonesia’s maritime borders. *Journal of Maritime Affairs*, 9(2), 16–37.
- Wijaya, H. (2022). Hotlines and rapid response mechanisms in regional maritime security. *Journal of Maritime Governance*, 8(2), 41–59.
- Yulianto, R. (2022). Indonesia’s strategic leverage in maritime negotiations. *Journal of International Security*, 9(1), 33–50.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).